

STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DIHADAPKAN DENGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN MARITIM GLOBAL DAN REGIONAL

Oleh:

Andhika Wira Kusuma¹⁾, M. Faisal²⁾
^{1,2}Universitas Pertahanan

Abstrak

Sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang strategis, Indonesia telah mencanangkan konsep poros maritim dunia sebagai agenda resmi pemerintah. Tulisan ini membahas tentang kondisi perairan Indonesia, perkembangan lingkungan strategis di tingkat global maupun kawasan, potensi ancaman yang ada serta strategi pertahanan laut yang dapat diterapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menyeleksi lebih dulu data primer yang diperoleh, dan kemudian melengkapinya dengan data sekunder serta informasi yang diperoleh melalui penelusuran internet. Hasil penelitian mengungkap beberapa tipe ancaman keamanan terkini yang cukup kompleks yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan juga maritim, yang datang dari meningkatnya ketegangan dan eskalasi konflik di Laut Cina Selatan, serta dari beragam kejahatan transnasional. Dalam hal konflik di Laut Cina Selatan, diperlukan cara yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan strategi penangkalan dengan menyusun dan memperkuat strategi pertahanan laut dengan membentuk komponen utama melalui restrukturisasi kementerian dan lembaga terkait berdasarkan aspek militer, politik, ekonomi, sipil, dan informasi, dimana strategi ini bergantung pada eskalasi konflik yang terjadi dan penggunaan kekuatan militer negara di wilayah yang disengketakan.

Kata kunci: Strategi, pertahanan, ancaman, keamanan

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim sekaligus negara kepulauan memiliki laut yang sangat luas dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 13 ribu pulau yang tersebar di wilayah laut seluas 5,8 juta km persegi, serta memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km sebagai salah satu garis pantai terpanjang di dunia (Dahuri, 2014). Posisi negara Indonesia yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta benua Asia dan Australia memberikan keuntungan secara geografis, dimana kondisi tersebut menjadi sangat potensial jika dapat dioptimalkan karena kondisi geografis tersebut akan mengarah pada terwujudnya aktivitas pelayaran yang ramai di wilayah Indonesia dengan sendirinya. Sedangkan bagi Indonesia, pentingnya aktivitas pelayaran tentunya disebabkan oleh posisi, luas wilayah laut, serta bentuk geografisnya. Posisi Indonesia yang strategis berada dalam persilangan jalur perdagangan dunia, membuat Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan perekonomiannya, selain itu perairan Indonesia yang merupakan bagian dari *sea lines of communication* (SLOC) bagi pelayaran internasional, memiliki arti yang penting bagi komunitas pengguna laut di dunia (Till, 2009). Status Indonesia sebagai negara kepulauan juga harus bisa mengakomodir kepentingan pelayaran dan penerbangan internasional yang akan melalui perairan laut teritorialnya. Semua fakta tersebut dapat diartikan jika Indonesia mampu memanfaatkan dan

mengelola peluang di wilayah lautnya, maka akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakatnya. Di sisi lain, apabila Indonesia tidak mampu mengelola dan mengantisipasi kerawanan yang ada, akan timbul potensi ancaman dan gangguan di dan lewat laut yang dapat mempengaruhi pertahanan negara.

Pada tahun 2014, pemerintahan presiden Jokowi mencanangkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia (PMD), yang diteruskan dengan memasukkan agenda tersebut dalam sembilan agenda pembangunan nasional. Selain itu, sejumlah RUU yang terkait dengan agenda tersebut juga telah dirancang seperti RUU pembangunan infrastruktur dan transportasi laut serta beberapa RUU lainnya, konsep pengembangan tol laut sebagai salah satu solusi untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya pun telah digagas sebagai tindak lanjut. Semua hal tersebut dilakukan untuk mengubah cara pandang terhadap laut yang selama ini dianggap sebagai pemisah menjadi laut sebagai penyatu dari wilayah-wilayah yang terpisah. Dalam kaitannya dengan perkembangan kawasan yang sangat dinamis, pentingnya strategi pertahanan laut di wilayah Indonesia menjadi isu yang menarik untuk dibahas, baik mengenai perairan di dalam wilayah Indonesia seperti alur laut kepulauan Indonesia, maupun perairan di batas-batas luar wilayah Indonesia. Gagasan mengenai poros maritim dunia harus bisa menjadi konsep utama yang mendasari pembangunan Indonesia dari sektor kemaritiman. Strategi pertahanan laut merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional, dimana permasalahan mengenai

potensi konflik, energi, ekonomi merupakan hal yang mutlak dan harus dipertahankan, dan sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, sudah sepatutnya sektor kemaritiman memperoleh perhatian lebih dari para pembuat kebijakan. Menurut Geoffrey Till, laut memiliki empat fungsi utama yang dapat memberikan keuntungan bagi negara pada masa damai maupun perang (2013). Pertama, laut merupakan tempat berkumpulnya sumber daya, baik hayati maupun energi, yang berperan penting bagi negara. Kedua, laut sebagai jalur transportasi dan perdagangan yang merupakan unsur penghubung utama dari aktivitas perdagangan serta merupakan bagian dari globalisasi yang dianggap dapat meningkatkan perdamaian dan kemakmuran. Ketiga, laut sebagai media informasi dan penyebaran ide, dimana meningkatnya arus aliran barang seringkali diikuti dengan pertukaran informasi atau ilmu pengetahuan baru dari berbagai belahan dunia. Terkait dengan hal ini, saat ini fungsi tersebut telah tergeser oleh perkembangan teknologi informasi. Keempat, laut sebagai atribut kekuasaan dimana negara menggunakan laut sebagai instrumen dalam upaya memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam bidang kemaritiman, aspek pertahanan dalam strategi pertahanan laut menekankan pada pentingnya kemampuan dalam peperangan sebagai bagian dari strategi bidang maritim secara keseluruhan. Perkembangan dalam bidang peperangan laut telah mengalami kemajuan pesat sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang pertahanan. Saat ini telah muncul beberapa teknologi baru yang mungkin dapat digunakan pada peperangan di masa mendatang, seperti adanya pesawat tempur, kapal selam, kapal permukaan maupun rudal jarak jauh dengan teknologi terbaru. Till berpendapat bahwa perkembangan teknologi juga akan berpengaruh terhadap perubahan arah strategi maritim (2005), di sisi lain terdapat kondisi-kondisi utama yang berpengaruh terhadap negara maritim seperti posisi geografis, tata ruang fisik, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter masyarakat dan karakter pemerintahannya (Mahan, 1889). Mahan berpendapat bahwa negara yang memiliki keuntungan dalam hal alam dan posisi strategis semestinya bisa memanfaatkan kelebihan tersebut untuk mencapai keunggulan kekuatan laut negara tersebut, dimana pendapat tersebut sesuai dengan karakter militer sebagai bagian dari kekuatan laut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi dengan tujuan untuk memahami fenomena yang ada untuk kemudian disajikan secara deskriptif. Pendekatan fenomenologi merupakan cara dimana penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu (Creswell, 2012). Penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahap. Yang pertama dimulai dengan

mengumpulkan, menelaah, dan mereduksi seluruh data yang didapatkan dari berbagai sumber untuk dianalisis. Tahap kedua adalah penyajian data yang sudah direduksi dan dianalisis untuk dijadikan dasar bagi langkah selanjutnya untuk melakukan analisis atau membuat kesimpulan, dan penarikan kesimpulan merupakan tahap ketiga dalam proses analisis (Sugiyono, 2018). Tipe penelitian kualitatif dalam tulisan ini berfokus pada menjelaskan suatu fenomena. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan teknik analisis data bertipe eksplanatif dimana tulisan ini bermaksud untuk membuat penjelasan secara faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena tertentu. Cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, jurnal, buku, dan halaman website. Selain itu, dilakukan juga pengamatan terhadap fenomena yang terjadi sehubungan dengan perkembangan situasi perkembangan lingkungan baik domestik, regional, maupun global.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi dan Banglingstra

Globalisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses atau serangkaian proses lintas wilayah yang menyebabkan meningkatnya kecairan dan tumbuhnya arus manusia, benda, tempat, dan informasi multi arah (Ritzer, 2006). Secara alamiah globalisasi merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari dan membuat kabur batas geografis suatu negara, dimana globalisasi menyebabkan negara-negara menjadi tanpa batas dan ada sebab serta akibat yang muncul dari pola interaksi tanpa sekat dan batasan geografis. Rosenberg berpendapat bahwa globalisasi terbangun dari elemen-elemen seperti ekonomi, sosial, politik, kultur, diplomasi, dan militer yang memiliki konteks dan keterhubungan yang unik (2005). Sejak awal abad 21, tercatat adanya peningkatan fenomena globalisasi pada industri pertahanan yang nampak semakin menguat sejak tahun 80an. Hal tersebut ditandai dengan adanya kecenderungan yang cukup signifikan dalam intensitas kerjasama antar negara dalam pembangunan industri pertahanan mereka (Caverley, 2007). Dalam era perkembangan teknologi saat ini, teknologi pertahanan dengan kemampuan siluman dan persenjataan nirawak seperti *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau *Autonomous Underwater Vehicle* (AUV) merupakan produk-produk yang menjadi andalan dalam industri pertahanan di negara-negara maju. Secara lebih lanjut, perubahan teknologi yang drastis dan cepat, yang muncul pada era Revolusi Industri 4.0, memaksa militer beradaptasi lebih cepat dan berevolusi untuk melakukan perubahan besar. Hal ini membuat kondisi yang berhadapan dengan dinamika lingkungan strategis dan perubahan geopolitik (Octavian, 2019). Kemajuan teknologi dan strategi pertahanan yang demikian pesat menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam

memaknai arti pertahanan dan keamanan nasional. Dalam dua dekade terakhir, kondisi lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik telah menunjukkan perkembangan yang dinamis, bahkan jauh lebih dinamis dibandingkan kawasan lain di dunia, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan. Perkembangan tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung di saat kawasan lain di dunia tengah mengalami resesi ekonomi. Hal ini mengakibatkan pergeseran sektor perkembangan perekonomian dunia dari negara-negara di kawasan Eropa ke negara-negara di kawasan Asia. Sehubungan dengan Indonesia, distribusi dari sekitar 75 persen komoditi yang diperdagangkan dikirim melalui laut dengan menggunakan wilayah perairan Indonesia, khususnya melalui perairan seperti Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Sunda, serta Laut Arafuru, dan laut-laut Indonesia lainnya, dan diperkirakan nilai perdagangan tersebut secara keseluruhan mencapai US\$ 1.500 trilyun setiap tahunnya (Warsito, 2014). Tingginya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya hubungan internasional antar negara, baik yang berasal dari negara di dalam maupun luar kawasan Asia Tenggara yang memiliki kepentingan, menjadikan kedudukan Indonesia semakin penting. Di sisi lain, dinamika ekonomi dan politik yang terjadi di dalam kawasan ini turut memberikan kontribusi potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan Indonesia, yang telah muncul sebagai sebuah negara dengan pengaruh besar secara regional, yang dapat diharapkan dapat menjadi sebuah negara dengan kekuatan menengah pada abad 21 (Polling, 2013). Seiring dengan visi Indonesia sebagai PMD, pemerintah telah berkomitmen agar Indonesia secara langsung turut berkepentingan untuk berperan menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudra Hindia, dimana Indonesia menginginkan situasi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, dan tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, sengketa wilayah wilayah, dan kompetisi supremasi maritim (Setkab, 2014). Gagasan PMD sendiri pada dasarnya merupakan bentuk dari kesadaran akan posisi strategis yang dimiliki Indonesia sebagai bagian dari jalur perdagangan dunia (SLOT) serta jalur komunikasi dan perhubungan dunia (SLOC) yang sudah ada sejak lama. Sebagai jalur perdagangan dunia, Indonesia juga mendapatkan perhatian lebih dari negara-negara pengguna laut karena di Indonesia terdapat tiga *choke point* yang terletak di tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Visi Indonesia sebagai PMD tersebut selaras dengan pemikiran Mahan, dimana pemerintah saat ini tengah berupaya mengembalikan karakter pemerintahan dan rakyat agar bercorak maritim dengan melaksanakan program-program pembangunan ekonomi dan politik yang berkarakter maritim, yang berdasarkan modal dasar kondisi geografis serta populasi penduduk

Indonesia yang besar jumlahnya. Sebagai konsekuensi, visi dari PMD juga menuntut kemampuan Indonesia untuk mengontrol, melakukan pengawasan, serta menjaga keamanan wilayah maritim (UNCLOS, 1982). Kondisi keamanan dan stabilitas maritim sendiri memiliki pengertian kegiatan baik sipil maupun militer yang dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kegiatan ilegal dan ancaman dalam domain maritim, melalui upaya penegakan hukum dan aturan demi melindungi warga negara dan kepentingan nasional (Srenal, 2015), sehingga peningkatan kemampuan institusi maritim yang berwenang berfungsi untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia serta menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia terhadap perlindungan wilayah maritim dan juga perlindungan kedaulatan laut Indonesia.

Ancaman Maritim Indonesia

Seiring dengan perkembangan jaman, bentuk dan pola ancaman terhadap suatu negara telah mengalami perubahan. Ancaman terhadap suatu negara saat ini tidak hanya berbentuk agresi militer atau perang terbuka dari negara lain, namun potensi ancaman saat ini telah berevolusi dengan melibatkan aktor non negara (Krahmann, 2005). Berdasarkan BPPI tahun 2015, ancaman dibagi menjadi dua, yaitu ancaman nyata dan ancaman belum nyata (2015). Salah satu ancaman nyata terhadap keamanan global adalah kejahatan lintas negara yang dipandang sebagai ancaman serius dan menjadikan kerawanan bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dalam UU No. 5 Tahun 2009 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes*, disebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kejahatan lintas negara, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan satwa dan tumbuhan illegal, perdagangan manusia, dan penyelundupan migran. Berdasarkan trend yang ada, saat ini terdapat beberapa jenis kejahatan lintas negara yang marak di Indonesia, diantaranya adalah perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, perompakan laut, penyelundupan senjata, pencucian uang, serta terorisme (BPPI, 2015), dimana semua ancaman kejahatan lintas negara tersebut berpotensi masuk dari ataupun terjadi di wilayah laut dikarenakan posisi Indonesia yang sangat terbuka. Ancaman keamanan maritim yang dihadapi Indonesia pada akhirnya akan menjadi permasalahan bersama di kawasan Asia Tenggara atau sebaliknya, yang dapat berkembang menjadi masalah bagi pertahanan dan keamanan, baik di tingkat nasional, regional maupun global. Selain itu, isu maritim regional yang terus berkembang saat ini adalah permasalahan klaim Laut Cina Selatan (LCS) oleh Cina. Implikasi konflik yang terjadi muncul dari perkembangan konflik LCS yang belum teratasi dan bahkan terus mengalami eskalasi ketegangan, sehingga negara yang tidak mampu menerapkan kebijakan strategisnya di kawasan tersebut juga akan kehilangan

kepentingan strategisnya. Saat ini, kondisi lingkungan strategis yang berkembang di kawasan ini adalah ketergantungan ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN terhadap Cina, dimana Cina merupakan negara yang mampu memanfaatkan kondisi tersebut hingga membuatnya leluasa untuk beraktivitas di wilayah yang menjadi sengketa (Meidi, 2014). Cina tampak leluasa dalam membangun dan mengembangkan pangkalan militer di Kepulauan Spratly dan Paracel (Hannah, 2018), walaupun seperti diketahui dunia internasional bahwa hal tersebut ilegal karena pulau-pulau tersebut masih dalam status sengketa. Potensi ancaman lain yang muncul adalah meningkatnya ketegangan di antara negara-negara yang bersengketa dan perlombaan untuk saling memperkuat kemampuan militernya di kawasan tersebut. Sebagai contoh adalah Filipina yang melakukan modernisasi militernya pada tahun 2017 dengan membeli alutsista dari Rusia (Mogato, 2017) dan juga Vietnam yang meningkatkan kapabilitas militernya dengan membeli kapal-kapal patroli dari India yang diyakini dilakukan untuk menjaga wilayah laut yang disengketakan dari dominasi Cina (Joshi, 2016). Jika dilihat dari dampaknya di masa mendatang, konflik LCS perlu mendapat prioritas dalam memprediksi arah ancaman, karena situasi konflik yang terjadi dapat berdampak secara luas terhadap kawasan dengan tidak mengesampingkan ancaman kejahatan lintas negara yang datang dari terorisme, pencurian dan pembajakan kapal, serta *illegal fishing*, bersama-sama dengan ancaman keamanan yang datang dari intervensi asing. Dalam masalah LCS, situasi yang berkembang di kawasan ini muncul dari intervensi Amerika Serikat (AS) terhadap kawasan LCS, dimana AS terlihat sangat proaktif dalam menentang kebijakan Tiongkok di LCS (US DoD, 2012). Kepentingan AS untuk menempatkan pangkalan militernya di Asia Timur dan Tenggara tentu berkaitan dengan *nation building* mereka, selain untuk menekan Korea Utara dalam program denuklirisasi, dan sekaligus untuk mengimbangi kekuatan Cina serta melindungi sekutunya (Revere, 2005). Hadirnya dua kekuatan besar di kawasan LCS menimbulkan dinamika persaingan di antara keduanya, dimana masing-masing terus mencari pengaruh dan dukungan di kawasan ini untuk kepentingannya. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Menhan AS yang siap memberikan bantuan kekuatan militer saat Indonesia mengalami ketegangan dengan Cina di wilayah LCS (Hasan, 2018). Bantuan ini bukan hanya bentuk dukungan, melainkan juga usaha AS untuk meraih simpati dari Indonesia, karena AS juga sangat membutuhkan dukungan dari negara-negara anggota ASEAN di kawasan ini untuk mempertahankan statusnya sebagai negara *super power*.

Strategi Pertahanan Laut Indonesia

Pada dasarnya, kebijakan pertahanan Indonesia diimplementasikan melalui segala

kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara guna mengoptimalkan kemampuan dalam menanggulangi berbagai ancaman. Kebijakan pertahanan negara tersebut mencakup pembangunan, pengerahan, maupun pemberdayaan pertahanan negara didukung dengan kebijakan penganggaran dan pengawasan. Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan terarah bagi segenap komponen pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun nonmiliter. Fungsi dan peran militer memiliki dua dimensi yakni untuk melakukan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang, sedangkan pertahanan nonmiliter memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertahanan sebagai usaha untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman nonmiliter, serta fungsi sesuai tugas pokok dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Indonesia, 2015). Penekanan terhadap permasalahan penguatan keamanan maritim juga didasari oleh masih tingginya gangguan keamanan di laut yang disebabkan masih kurangnya kehadiran dan pengawasan aparat keamanan di laut. Dalam mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan program berupa peningkatan pengawasan wilayah perairan Indonesia serta peningkatan sarana dan prasarana perbatasan laut.

Sehubungan dengan potensi ancaman di LCS, konflik yang tengah berlangsung di wilayah tersebut memang sepertinya tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Walaupun Indonesia bukan termasuk negara *claimant*, mau tidak mau Indonesia harus turut mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Doktrin pertahanan Indonesia yang bersifat defensif aktif mengharuskan Indonesia mempertahankan kedaulatannya atas kemungkinan invasi dari pihak asing. Indonesia memiliki alat pertahanan negara berupa TNI sebagai komponen utama pertahanan yang bertugas menjaga kedaulatan NKRI (Indonesia, 2004). Seperti yang dijelaskan bahwa kondisi lingkungan strategis di kawasan LCS sangatlah dinamis dan memungkinkan terjadinya konflik dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi yang tepat guna mengantisipasi hal tersebut. Konsep dasar dari serangan dan pertahanan adalah letak sumber kekuatan, dimana terdapat area yang vital atau strategis dan di sanalah pusat serangannya yang lebih besar, sehingga pertahanan di dalam obyek vital tersebut juga harus lebih kuat. Bentuk serangan terkuat adalah serangan yang ditujukan untuk menduduki fasilitas maritim strategis seperti terminal pelabuhan, dan membangun blokade yang dapat berpengaruh terhadap laju ekonomi negara. Oleh karena itu, pulau yang terdekat dengan LCS seperti Natuna seyogyanya tidak dikembangkan sebagai kota pelabuhan atau perdagangan, melainkan lebih dimanfaatkan untuk fungsi pertahanan. Dalam strategi pertahanan laut, kekuatan pertahanan maritim mutlak diperlukan. Dalam kondisi apapun, kekuatan militer yang ada tidak akan mampu menangkal atau

melakukan serangan balasan tanpa adanya pertahanan yang memadai. Dengan kata lain, jika Indonesia tidak memiliki kemampuan mampu untuk melakukan penyerangan, maka Indonesia dapat melakukan pertahanan. Jika sebuah negara tidak memiliki kekuatan laut yang superior, maka bertahan adalah cara paling efektif dalam mengamankan kedaulatan wilayah dengan cara penyerangan balasan di wilayah perairan laut sendiri. Salah satu keuntungan dari bertahan adalah menunda sebuah keputusan. Seperti diketahui bahwa menyerang musuh membutuhkan perhitungan taktik dan strategi yang sangat teliti dan penuh dengan perhitungan. Sehingga dengan bertahan, setidaknya mampu membuat musuh mengambil sebuah keputusan yang sulit (Clausewitz, 1989). Dalam pengertian ini, bertahan bukan berarti bersikap pasif, melainkan merupakan bentuk dari negosiasi peperangan, dimana konsep untuk bertahan tersebut sebenarnya didukung dengan kemampuan konsep *Minimum Essential of Force* (MEF) yang sudah dimulai sejak dari tahun 2012 (Kemhan, 2012). Dalam sebuah strategi pertahanan maritim diperlukan suatu komando laut (Corbett, 2015), dimana tugas dari komando laut tersebut bukanlah untuk menaklukkan wilayah laut atau menginvasi pantai dalam wilayah musuh, melainkan untuk mengontrol komunikasi maritim, baik untuk kepentingan komersial maupun militer. Penguasaan komunikasi laut ini menetapkan batasan, larangan, dan hak kepada siapapun yang berlayar di wilayah komando. Penguasaan tersebut ini dapat berupa otoritas penuh atas properti publik atau swasta yang berada di laut, sehingga mempertahankan laut memang penting, namun mempertahankan komando laut dari serangan musuh juga harus diprioritaskan. Dalam strategi pertahanan laut yang bersifat defensif aktif, Indonesia akan lebih banyak melakukan kegiatan observasi dan pengawasan. Kapabilitas terkuat yang mungkin dilakukan adalah menggabungkan antara kemampuan bertahan dan menyerang, dimana posisi bertahan lebih mudah dilakukan untuk tindakan pencegahan, karena strategi pertahanan laut defensif aktif bukan merupakan sebuah perang laut untuk menghancurkan armada lawan, melainkan untuk mencegah pasukan musuh melewati laut teritorial dan melindungi kapal-kapal kita dalam melaksanakan kegiatan patroli. Sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, TNI AL dapat melakukan tindakan guna mengintervensi musuh sebagai bentuk supremasi komando laut di wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, pengetahuan mengenai kekuatan militer negara yang bersengketa di LCS sangat penting untuk dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk menentukan strategi pertahanan laut yang tepat. Menurut laporan dari CSIS Brief, Cina tengah mengembangkan alutsista nirawak berupa UAV dan AUV, selain itu Cina juga terus mengembangkan rudal jarak jauh *Inter Continental Ballistic Missile* (ICBM) dan *Submarine*

Launch Ballistic Missile (SLBM) (Ian & Masao, 2019). Cina juga merupakan negara yang memiliki senjata nuklir, dimana keberadaan senjata nuklir tersebut dapat dijadikan alat untuk memperkuat sistem pertahanannya baik ofensif maupun defensif. Secara ofensif, senjata nuklir berguna untuk memberikan pengaruh seperti intimidasi, terhadap negara lain yang lebih lemah, sedangkan secara defensif, senjata nuklir Cina berfungsi untuk memberikan efek *deterrent* bagi negara yang lebih kuat khususnya AS (Ahyar, 2019). Pada dasarnya, konflik di LCS hingga saat ini bukanlah merupakan konflik militer, dimana kekuatan laut Cina tidak secara langsung hadir di wilayah yang disengketakan. Dalam prakteknya, kegiatan yang dilakukan oleh Cina adalah penguasaan secara fisik terhadap wilayah sengketa dan pembangunan pulau-pulau buatan, selain itu kapal-kapal nelayan Cina juga secara aktif melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan dikawal oleh *coast guard* Cina yang dalam hal ini adalah non militer, sehingga dapat diartikan bahwa perang yang terjadi bersifat hibrida. Secara umum, perang hibrida dapat diartikan sebagai sinkronisasi penggunaan beberapa instrumen kekuatan untuk menyerang spektrum kerentanan suatu negara dalam mencapai kepentingan strategisnya (Patrick & Erik, 2017). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 dinyatakan bahwa sistem pertahanan Indonesia adalah pertahanan bersifat semesta yang memadukan segala elemen dan sumber daya nasional dalam menghadapi ancaman baik militer maupun non militer, sehingga diperlukan keterlibatan kementerian dan lembaga terkait disesuaikan dengan bidang tugasnya dengan dukungan kekuatan militer dan elemen kekuatan bangsa lainnya.

4. PENUTUP

Situasi dan kondisi keamanan di perairan Indonesia secara umum masih menunjukkan perkembangan yang dinamis dengan masih adanya potensi ancaman instabilitas kawasan. Fenomena yang ada memperlihatkan kecenderungan masih terjadinya kegiatan ilegal di laut berupa kejahatan lintas negara maupun meningkatnya eskalasi konflik di LCS, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap Indonesia. Eskalasi ketegangan dan konflik antar negara dan perilaku *claimants* yang agresif terkait LCS, terutama Cina serta aksi-aksi kejahatan lintas negara di laut sangat rawan memicu instabilitas wilayah di Indonesia. Secara realistis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pentingnya wilayah perairan Indonesia dan prospek ancamannya, serta upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia membutuhkan kehadiran negara dengan kemampuan yang tinggi dalam mengelolanya, disamping kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen untuk menciptakan stabilitas jangka panjang agar Indonesia dapat meraih manfaat kemakmuran yang optimal dari

posisi geopolitik dan geostrategis yang baik. Khusus untuk permasalahan konflik di LCS, gejala yang berkembang di wilayah tersebut menuntut Indonesia menerapkan strategi pertahanan maritim yang tepat untuk mengantisipasi konflik berskala besar yang mungkin terjadi. Indonesia dapat memperkuat kapabilitas kekuatan pertahanan maritimnya dengan memperkuat komando laut, menguasai dan mengontrol jalur komunikasi maritim serta melakukan pengamatan akan kapabilitas militer pihak-pihak yang terlibat. Dalam pertahanan menangkal serangan hibrida di LCS, strategi perang semesta yang melibatkan seluruh komponen sumber daya yang dimiliki dengan melibatkan instansi lain yang terkait merupakan salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah, walaupun strategi maritim yang dibuat tersebut hanya akan memberikan daya tangkal dan pertahanan yang bersifat sementara tergantung tingkat konflik yang berkembang.

5. REFERENSI

- Ahyar, A. (2019). Parade Dongfeng 41, Senjata Nuklir China Paling Ditakuti AS", 6 Oktober 2019, dalam [https:// akuratnews.com/parade-dongfeng-41-senjanuklir-china-paling-ditakuti-as/](https://akuratnews.com/parade-dongfeng-41-senjanuklir-china-paling-ditakuti-as/), diakses pada 12 Januari 2021.
- Caverley, J. D. (2007). United States Hegemony and the New Economics of Defense. *Journal of Security Studies*, Vol. 16.
- Clausewitz, C. Von. (1989). *The Strategic Collection: The Art of War, On War, The Prince*. Edited and Translated by Michael Howard and Peter Paret. New Jersey: Princeton University Press.
- Corbett, J. S. (2015). *Some Principles of Maritime Strategy*. USA: Middletown.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahuri, R. (2014). "Roadmap Pembangunan Kelautan untuk Mengembangkan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Menuju Indonesia yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat." dalam Tim Ahli Seknas Jokowi, *Jalan Kemandirian Bangsa*. Jakarta: Kompas, Gramedia.
- Hannah, B. (2018). China's Sea Control Is a Done Deal, 'Short of War With the U.S', 20 September 2018, dalam <https://www.nytimes.com/2018/09/20/world/asia/south-china-sea-navy.html>, diakses pada 11 Januari 2021.
- Hasan, R. A. (2018). Menhan AS: Kami Siap Bantu RI di Laut China Selatan dan Natuna, 23 Januari 2018, dalam <https://www.liputan6.com/global/read/3235768/menhan-as-kami-siap-bantu-ri-di-laut-china-selatan-dan-natuna>, diakses pada 12 Januari 2021.
- Ian, W., & Masao, D. (2019). More Than Missiles: China Prepares its New Way of War. Washington: CSIS Briefs.
- Joshi, M. (2016). Vietnam will never be for India what Pakistan is to China, 5 September 2016, dalam <https://www.orfonline.org/research/vietnam-will-never-be-for-india-what-pakistan-is-to-china/>.
- Kemhan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Kemhan. (2012). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama*. Kementerian Pertahanan RI.
- Krahmann, E. (2005). *New Threats And New Actors in International Security (Issue October)*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mahan, A. T. (1889). *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*. Boston: Little Brown and Company.
- McCuen, J. J. (2008). *Hybrid Wars*. *Military Review*, Vol. 88.
- Meidi. (2014). *Conflicts in the South China Sea and China-ASEAN Economic Interdependence: A Challenge to Cooperation*, ASEAN-Canada Working Paper Series no. 7.
- Mogato. (2017). *Philippines, Russia Sign Two Military Deals*, 25 Oktober 2017, dalam <https://de.reuters.com/article/us-philippines-russia-defence/philippines-russia-sign-two-military-deals>, diakses pada 12 Januari 2020.
- Octavian, A. (2019). *Revolusi Industri 4.0 Paksa Militer Beradaptasi Ke Artificial Intelligence*, diakses dari <http://samudranesia.id/revolusi-industri-4-0-paksa-militer-beradaptasi-ke-artificial-intelligence/>, pada 12 Januari 2021.
- Patrick, J. C., & Erik, R. K. (2017). *Countering Hybrid Warfare Project: Understanding Hybrid Warfare*.
- Polling, G. B. (2013). "Dynamics Equilibrium: Indonesia's Blue Print for a 21st Century Asia Pacific". Washington DC: CSIS.
- Revere, E. J. R. (2005). *U.S. Interests and Strategic Goals in East Asia and the Pacific*, 2 Maret 2005, dalam <https://2001-2009.state.gov/p/eap/rls/rm/2005/42900.htm>, diakses pada 12 Januari 2021.
- Ritzer, G. (2006). *The Globalization of Nothing, Mengkonsumsi Kehampaan di Era Globalisasi*.
- Rosenberg, J. (2005). *Globalization Theory: A Post Mortem*. *International Politics*, Vol. 42.
- Setkab. (2014). *Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014*, dalam <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar>, pada 12 Januari 2021.
- Setneg. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara*

- Nasional Indonesia Pasal 9. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Srenal. (2015). Langkah-Langkah Strategis TNI AL Dalam Mendukung PMD.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Till, G. (2005). Sea Power - A Guide for the Twenty First Century. London: Frank Cass.
- Till, G. (2009). Seapower - A Guide for the Twenty-First Century Second Edition. London: Frank Cass Publishers.
- Till, G. (2013). The Historic Attributes of The Sea And Maritime Developments in The Asia-Pacific. In J. Ho & S. Bateman (Eds.), Maritime Challenges and Priorities in Asia: Implications for Regional Security. New York: Routledge.
- UNCLOS 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (1982).
- US DOD. (2012). Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense.
- Warsito, T. (2014). "Geostrategi Maritim Indonesia dalam Perspektif Diplomasi," dalam, Jalan Kemandirian Bangsa. Jakarta: Gramedia.